

DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022



DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja adalah merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama periode satu (1) tahun, yaitu tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 telah tersusun melalui beberapa tahapan yang cukup panjang dan rumit.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajian untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, April 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar belakang	1
I.2. Dasar Hukum.....	3
I.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja.....	21
I.4. Sistematika penulisan	22
BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020.....	23
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD	23
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
II.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	32
II.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	33
II.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan.....	46
BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.....	50
3.2. Tujuan dan Sasaran	52
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB.IV. PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DAERAH	61
BAB.V. PENUTUP	63

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah meliputi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
- f. Penetapan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kota Bima Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bima periode 2018 - 2023 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 -2023 dan RPJMN Tahun 2019 - 2024, di mana RPJMD Kota Bima periode 2018 -2023 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima serta sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 mengacu pada landasan hukum dan ketentuan sebagai berikut.

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2022 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Anggaran Dinas.
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

3. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Penguatan kelembagaan
 - Penataan organisasi: Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM.
 - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak.
7. Kualitas dan pemanfaatan data mikro kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD.
8. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia.
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
12. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;

- Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
- Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dibidang PP dan PA;
- Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang PP dan PA;
- Pemanataan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan

bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang PP dan Gender:

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyaiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumplan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informmasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

1..Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender dibidang Ekonomi mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;

- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi.

2..Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan peaksanaan pengarusutamaan dan PP dibidang sosial politik dan hukum;
- Pemanatauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP dibidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial politik dan hukum;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;

- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum.

3..Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga.
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan

- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;

- Penyiapan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :

1..Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi

dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya.

2..Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya.

3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

E. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketegakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

1..Saksi Perlindungan Perempuan.mempunyai tugas:

- Penyiapan perumusan kajian dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan konsisi khusus serat dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penagnanan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan konsisi khsusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan dibidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondidi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

2..Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

mempunyai tugas:

- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisis penerapan kebijakandibidang perlindungan khusus anak;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.

3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analiasa dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijaka pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4..Kelompok Jabatan Fungsional

5..Staf.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT;
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan;

9. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak;
10. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
11. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Kota Layak Anak;
12. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perlindungan Anak;
13. Peraturan meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 04 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bima:
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 221);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 532).

1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1.3.1. Maksud adalah :

- a. Himpunan usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Bima di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Sebagai informasi tentang kebutuhan Dinas PP dan PA Kota Bima dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021
- c. Sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja perencanaan pada Dinas PP dan PA Kota Bima

1.3.2. Tujuan adalah :

Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Kota Bima Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja Dinas PP dan PA Kota Bima 2021 sbb :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPP-PA TAHUN LALU

Proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi Rencana Strategis Dinas PP-PA Kota Bima tahun 2013-2018 yang memuat Indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas PP dan PA

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dalam melaksanakan pengembangan visi dan misi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Salah satu indikator kinerja terukur adalah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat laporan kinerja tahun berjalan capaian kinerja berdasarkan input-output). Kinerja sektor Pemberdayaan Perempuan dan data kekerasan menggambarkan hasil, tetapi ditunjukkan oleh dampak program (outcome). Berdasarkan Renstra, terdapat dua faktor prioritas pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bima antara lain, antara lain: peningkatan ketersediaan layanan, peningkatan keterjangkauan layanan. Jika pemerintah daerah fokus terhadap peningkatan ketersediaan maka program/kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun demikian untuk mengevaluasi kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Dinas PP da PA sampai dengan Tahun 2020

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019)			Target Program Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.02	2.02.01	01		PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN									
2	2.02	2.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat. dan Jumlah operasional jasa Non Pegawai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa Kawat Faximili/Internet/TV Kabel (TV Lokal)	82,28%	84,45%	100,00%	82,28%	82,28%	82,28%	83,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	Jumlah jasa pemeliharaan/perawatan Kendaraan bermotor dan terbayarnya operasional supir	58,96%	83,06%	100,00%	58,96%	58,96%	58,96%	66,99%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa tenaga Kebersihan (Clening Service) dan keamanan Kantor	91,47%	100,00%	100,00%	91,47%	91,47%	91,47%	94,31%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang memadai	89,15%	100,00%	100,00%	89,15%	89,15%	89,15%	92,77%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak untuk dokumen Dinas	86,85%	99,98%	100,00%	86,85%	86,85%	86,85%	91,23%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlahkomponen alat Listrik kantor yang memadai	63,41%	100,00%	100,00%	63,41%	63,41%	63,41%	75,61%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jasa Media Cetak	75,62%	66,48%	100,00%	80,19%	80,19%	80,19%	75,62%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	JumlahMakan Minum Pegawai yang cukup Memadai	95,00%	96,48%	100,00%	94,26%	94,26%	94,26%	95,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Fungsi Koordinasi dinas luar daerah	99,21%	99,57%	100,00%	99,03%	99,03%	99,03%	99,21%	100,00%

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.02	2.02.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
2	2.02	2.02.01	02	10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Filing Kabinet	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	02	22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	70,11%	100,00%	100,00%	55,17%	55,17%	55,17%	70,11%	100,00%
2	2.02	2.02.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tjumlah operasional kendaraan dinas	86,17%	58,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,17%	100,00%
2	2.02	2.02.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan dan perawatan (AC) Kantor	94,20%	100,00%	100,00%	91,30%	91,30%	91,30%	94,20%	100,00%
2	2.02	2.02.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	86,17%	58,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,17%	100,00%
2	2.02	2.02.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
2	2.02	2.02.01	03	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu dan pengadaan pakaian Sipil Harian Daerah (PSH)(Hitam Putih bagi pegawai honorer) yang memadai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	06		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
2	2.02	2.02.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumentasi (Pejabat Pengelola Informasi Daerah PPID) di lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semester	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen/laporan Keuangan akhir tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Renja, Renstra,RKA / DPA, DPPA SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan, Renja,renstra RKA, DPA, DPPA	87,19%	100,00%	100,00%	80,79%	80,79%	80,79%	87,19%	100,00%
2	2.02	2.02.01	06	06	Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD	Jumlah Laporan LAKIP, LPPD,	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN									

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.02	2.02.01	15	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina dan adanya kesetaraan ekonomi keluarga serta Terlaksananya kegiatan P2WKSS (Peningkatan peranan wanita Keluarga Sehat Sejahtera)	98,32%	100,00%	100,00%	97,48%	97,48%	97,48%	98,32%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah Kader Partai Politik Perempuan	93,71%	100,00%	100,00%	90,57%	90,57%	90,57%	93,71%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	03	pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan Anak	Jumlah kader PUG sekota bima yang melaksanakan Pelatihan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	04	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	86,98%	82,19%	100,00%	89,38%	89,38%	89,38%	86,98%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	05	Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan.	Jumlah SKPD sebagai peserta pelatihan PPRG (perencanaan penganggaran yang responsif gender) se kota Bima	98,36%	100,00%	100,00%	97,54%	97,54%	97,54%	98,36%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Forum Patisipasi Publik (PUSPA)	99,90%	99,72%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%	99,90%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	07	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Kelompok Fokal Point PUG Pada SKPD Lingkup Kota Bima	98,21%	96,28%	100,00%	99,18%	99,18%	99,18%	98,21%	100,00%
2	2.02	2.02.01	15	08	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah ketenaga kerja perempuan serta pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi Keluarga	98,08%	100,00%	100,00%	97,12%	97,12%	97,12%	98,08%	100,00%
2	2.02	2.02.01	16		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN ANAK									
2	2.02	2.02.01	16	01	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Adanya Rincian Pembagian Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.	86,87%	96,70%	100,00%	81,96%	81,96%	81,96%	86,87%	100,00%

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Prangkat daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.02	2.02.01	16	02	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM pada 3 Kelurahan	99,47%	100,00%	100,00%	99,20%	99,20%	99,20%	99,47%	100,00%
2	2.02	2.02.01	16	03	Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih Adanya Kelompok Forum Anak di Kecamatan dan terselesainya kegiatan hari anak Tingkat kota serta terpilihnya duta anak tingkat Provinsi, Nasional	92,97%	100,00%	100,00%	89,46%	89,46%	89,46%	92,97%	100,00%
2	2.02	2.02.01	16	04	Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah data Pemutahiran Profil Anak Kota Bima	37,17%	100,00%	100,00%	5,76%	5,76%	5,76%	37,17%	100,00%
2	2.02	2.02.01	16	05	Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dibentuk	43,34%	100,00%	100,00%	15,01%	15,01%	15,01%	43,34%	100,00%
2	2.02	2.02.01	17		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2	2.02	2.02.01	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah peserta Kegiatan Pengumpulan data KDRT	79,93%	91,16%	100,00%	74,32%	74,32%	74,32%	79,93%	100,00%
2	2.02	2.02.01	17	02	Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	99,92%	100,00%	100,00%	99,88%	99,88%	99,88%	99,92%	100,00%
2	2.02	2.02.01	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah peserta kegiatan Dialog Warga	97,07%	100,00%	100,00%	95,61%	95,61%	95,61%	97,07%	100,00%
2	2.02	2.02.01	17	04	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online.	45,35%	100,00%	100,00%	18,03%	18,03%	18,03%	45,35%	100,00%
	2.02	2.02.01	17	05	Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM dalam penanganan Kasus kekerasan	89,51%	100,00%	100,00%	84,26%	84,26%	84,26%	89,51%	100,00%
2	2.02	2.02.01	17	06	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	Jumlah peserta kegiatan pelatihan peningkatan SDM bagi kader P2TP2A	96,81%	100,00%	100,00%	95,21%	95,21%	95,21%	96,81%	100,00%

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun 2019)			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Prangkat daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	2.02	2.02.01	17	07	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Jumlah Peserta Keg. Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan salah lainnya terhadap anak	99,95%	100,00%	100,00%	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	100,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Berdasarkan sasaran/target Rencana (RENSTRA) Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan wajib serta Indikator Kinerja Pelayanan. Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan.

Dengan melihat kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat mensinergiskan proses perencanaan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima dalam rangka:

- a. Perencanaan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- b. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- c. Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
- d. Peningkatan Advokasi, KIE Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meskipun belum optimal
- e. Pengembangan P2TP2A
- f. Pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam program penanggulangan bencana
- g. Menoptimalkan partisipasi Masyarakat.

Dengan melihat kondisi pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima dapat dilihat pada tabel 2.2.sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah baik di Tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	3	4	5	6	7	8=(7/6)						
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	-		12,00	16,00	133,33%	16	12,00	16,00	16	16	
2	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	-		53,47	53,47	100,00%	55,48	53,47	53,47	55,47	55,48	
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	-		46,52	46,52	100,00%	47,02	46,52	46,52	46,72	47,02	
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan	-		80,00	80,00	100,00%	85	80,00	80,00	80	85	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			100,00	100,00	100,00%	100	100,00	100,00	100	100	
6	Rasio KDRT		Angka KDRT	0,65%	0,63%	0,60%	0,58%	0,108%	0,146%	0,60%	0,58%	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT dirumah sakit			88,30	90,00	101,93%	100	88,30	90,00	100	100	

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	3	4	5	6	7	8=(7/6)						
8	Partisipasi angkatan kerja Perempuan			46,52	46,52	100,00%	47,02	46,52	46,52	46,72	47,02	
9			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,21	61,73	63,25	64,77	65,33%	65,42%	63,25	64,77	
10			Angka Kekerasan terhadap anak	0,105	0,095	0,086	0,067	0,067%	0,072%	0,086	0,067	
11			Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	0	20%	40%	60%	0	60%	40%	60%	

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang di singkat DPP-PA Kota Bima di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penjang pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota Bima.

Yang menjadi isu penting pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP-PA Kota Bima dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan
 - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA Kota Bima, dan masih Kurangnya SDM
 - Ada beberapa Produk hukum Daerah (perwali PP) terkait dengan Perlindungan Perempuan
- b. Kurangnya kuantitas, jangkauan dan kualitas Komunikasi Informasi Eduasi (KIE)
- c. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai OPD
- d. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
- e. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Pengembangan program Dinas PP dan PA Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- g. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.
- h. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
- j. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA.
- k. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

2.4. Reviw terhadap Rancangan awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan prodak dokumen perenanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra SKPD Renja SKPD.

Dokumen Perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengalami perubahan sesuai dengan rancangan awal RKPD kota Bima tahun 2022 agar terwujudnya dokumen perencanaan mulai dari RPJMD dengan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. ***Dapat dilihat dalam tabel Reviw terhadap Rancangan awal RKPD di bawah ini.***

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima			3.215.179.816,47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima			3.231.942.574,00	
2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Bima			21.605.280,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Bima			18.913.000,00	
01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	3.276.430,00	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	3.181.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1.986.870,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1.929.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKAP	1 Dokumen	1.986.870,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKAP	1 Dokumen	1.929.000,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1.134.030,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1.101.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPPA	1 Dokumen	1.134.030,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPPA	1 Dokumen	1.101.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	8.216.310,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	5.914.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan LKIP dan LPPD	2 Laporan	3.870.740,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan LKIP dan LPPD	2 Laporan	3.758.000,00	
2.02	Administrasi Keuangan	Kota Bima			2.567.507.881,97	Administrasi Keuangan	Kota Bima			2.786.372.574,00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	22 org	2.471.793.071,97	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	23 Bulan	2.660.254.574,00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	5 org	91.618.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	122.400.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.935.370,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.879.000,00	
07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Lap. Prognosis (LRA)	2.160.940,00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Lap. Prognosis (LRA)	1.839.000,00	
2.06	Administrasi Umum	Kota Bima			358.299.099,50	Administrasi Umum	Kota Bima			198.382.200,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan penerangan lingkungan / bangunan kantor yang memadai dan representatif	8 Komponen	4.221.918,50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan penerangan lingkungan / bangunan kantor yang memadai dan representatif	8 Komponen	2.212.800,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor	10 Jenis	37.032.620,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor	10 Jenis	30.311.000,00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Makan dan minuman	12 Bulan	13.381.760,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Makan dan minuman	12 Bulan	9.744.000,00	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	33.264.056,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	26.146.400,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah kerjasama dengan media	8 media	14.832.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah kerjasama dengan media	8 media	0,00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	255.566.745,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	129.968.000,00	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima			38.422.811,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima			9.450.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeleur yang diadakan	1 pkt	8.698.144,00	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeleur yang diadakan	1 pkt	0,00	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	29.724.667,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	9.450.000,00	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			103.272.744,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			96.424.800,00	
01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dan jumlah Jasa Non Pegawai selama 1 tahun	12 Bulan	67.362.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dan jumlah Jasa Non Pegawai selama 1 tahun	12 Bulan	61.560.000,00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	11.141.304,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10.816.800,00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	24.769.440,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	24.048.000,00	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			126.072.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			122.400.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	13 Unit	92.710.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	13 Unit	90.010.000,00	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	19.436.100,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	18.870.000,00	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	13 Unit	9.527.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	13 Unit	9.250.000,00	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	7 Unit	4.398.100,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	7 Unit	4.270.000,00	
02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bima			3.507.418.449,66	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bima			3.097.698.822,00	
2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			58.540.462,00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			61.818.600,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	39.037.206,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	33.612.800,00	
04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	19.503.256,00	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	28.205.800,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			1.571.678.039,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			1.094.613.400,00	
02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	1.571.678.039,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	1.094.613.400,00	
2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			1.877.199.948,66	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			1.941.266.822,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok	1.568.199.977,50	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok	1.506.271.850,00	
03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	10 kelp	308.999.971,16	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	10 kelp	434.994.972,00	
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Bima			235.914.977,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Bima			211.252.100,00	
2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			65.056.091,00	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			32.978.900,00	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 dok	52.768.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 dok	24.167.800,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org	12.287.591,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org	8.811.100,00	
2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			170.858.886,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			178.273.200,00	
01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Satgas yang terbentuk	16 kel	16.043.486,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Satgas yang terbentuk	16 kel	23.457.800,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah layanan rujukan lanjutan terhadap perempuan korban kekerasan	8 kss	154.815.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah layanan rujukan lanjutan terhadap perempuan korban kekerasan	8 kss	154.815.400,00	
05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Bima			10.387.035,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Bima			18.838.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Bima			10.387.035,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Bima			18.838.000,00	
01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	6.734.140,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	9.582.000,00	
02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	3.652.895,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	9.256.000,00	
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bima			239.998.240,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bima			180.992.200,00	
2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			121.094.010,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			115.982.200,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga	46.149.665,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	7 lembaga	22.256.100,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50 %	74.944.345,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan dan kecamatan	50%	93.726.100,00	
2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			118.904.230,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			65.010.000,00	
01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	45.707.898,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	4.320.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Duta Forum Anak yang Terpilih	3 org	73.196.332,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Duta Forum Anak yang Terpilih	3 org	60.690.000,00	
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bima			404.460.228,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bima			372.561.700,00	
2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			43.360.476,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			28.972.200,00	
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	14.388.276,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	0,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	50 org	28.972.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	50 org	28.972.200,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			315.495.266,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			294.749.600,00	
01			Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 org	90.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 org	85.475.000,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan anak korban kekerasan	12 kss	225.495.266,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan anak korban kekerasan	12 kss	209.274.600,00	
2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			45.604.486,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			48.839.900,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	20433964,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	11.416.200,00	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50 peserta/10 kelompok PATBM	25170522,00	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50 peserta /10 kelompok PATBM	37.423.700,00	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja tahun Ketiga Penjabaran dari pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023 rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022 didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari Para pemangku kepentingan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5.sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Maupun Tingkat Kota Bima
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima			
	A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Bima			
		01 Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKAP	1 Dokumen	
		04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	
		05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPPA	1 Dokumen	
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	
		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan LKIP dan LPPD	2 Laporan	
	B	Administrasi Keuangan	Kota Bima			
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	23 Bulan	

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	
	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
	04	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Lap. Prognosis (LRA)	
C		Administrasi Umum	Kota Bima			
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan penerangan lingkungan / bangunan kantor yang memadai dan representatif	8 Komponen	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor	10 Jenis	
	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Makan dan minuman	12 Bulan	
	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	
	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah kerjasama dengan media	8 media	
	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	
D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima			

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	
E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			
	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dan jumlah Jasa Non Pegawai selama 1 tahun	12 Bulan	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	
F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima			
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	13 Unit	
	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	
	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	13 Unit	

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	7 Unit	
II		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bima			
	A	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	
	02	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG		Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	
	B	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	C		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima		
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok
		02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	10 kelp
III			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Bima		
	A		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima		
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 dok
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	B		Kota Bima			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
		01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Satgas yang terbentuk	16 kel	
		02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan		Jumlah layanan rujukan lanjutan terhadap perempuan korban kekerasan	8 kss	
IV		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Bima			
	A		Kota Bima			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota				
		01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	
		02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
V		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bima			
	A	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			
		01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	7 lembagat	
		02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan da kecamatan	50%	
	B	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima			
		01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			2	3	4	5	6
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Duta Forum Anak yang Terpilih	3 org	
VI			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bima			
	A		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	50 org	
	B		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6
	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 org	
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan anak korban kekerasan	12 kss	
C		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima			
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50 peserta/10 kelompok PATBM	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tertuang pada Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2016, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan dan tugas dekosentrasi.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu prioritas pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Wirausaha.
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.
3. Pengurangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .
4. Pengurangan Pekerja Anak.
5. Pencegahan Perkawinan Anak.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga
3. Berkurangnya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Termaksud TPPO
4. Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Terhadap Perempuan Termaksud TPPO
5. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Berkurangnya Kasus Kekerasan Pada Anak
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Anak
8. Meningkatnya Kualitas Data Pilah Gender Dan Anak

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2022, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kota diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Tantangan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima periode 2018-2023 guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kota Bima, serta pencapaian dari sasaran strategis di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat yaitu sebagai berikut:

1. Revitalisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyerasian kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditekankan pada :
 - Penyusunan produk hukum Daerah tentang Perwali Perlindungan Perempuan dan Perwali Perlindungan Anak
 - Kerjasama lintas sector Pemberdayaan perempuan yang serasi dan efektif.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan hak Anak .
 - Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Fasilitasi pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Penyediaan sistem Pendataan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, dengan menekankan koordinasi lintas sector dan partisipasi masyarakat dan menuju penggunaan sistem pendataan perempuan dan anak berbasis Teknologi Informatika.
 - Pelatihan, dan pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pembangunan khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan membantu Walikota Bima dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61.73%	63.25%	64.77%	66.29%	67.81 %
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	1	Angka KDRT	0.63%	0.60%	0.58%	0.56%	0.55%
			2	Angka Kekerasan terhadap anak	0.095%	0.086%	0.067%	0.057%	0.057 %
2	Mewujudkan Kota layak anak	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	1	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	40%	60%	80%	100%

3.3. Program dan kegiatan.

3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2018-2023 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP-PA Kota Bima 2018-2023.

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		01	Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		05	Pengadaan Mebel
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		01	Penyediaan jasa surat menyurat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
		2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
		3.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
		3.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		5.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		6.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		6.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		7.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
		7.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		7.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 6 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan pendukung. Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	Kota Bima	100%	3.231.942.574,00				3.393.539.702,70
2	08	2.08.00.00.01	01	20.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	18.913.000,00			100%	19.858.650,00
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra	Jumlah dokumen Renstra dan Renja		2 Dokumen	3.181.000,00			2 Dokumen	3.340.050
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA		1 Dokumen	1.929.000,00			1 Dokumen	2.025.450
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKAP		1 Dokumen	1.929.000,00			1 Dokumen	2.025.450
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA		1 Dokumen	1.101.000,00			1 Dokumen	1.156.050
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA		1 Dokumen	1.101.000,00			1 Dokumen	1.156.050
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 Dokumen	5.914.000,00			1 Dokumen	6.209.700
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan LKIP dan LPPD		2 Laporan	3.758.000,00			2 Laporan	3.945.900
2	08	2.08.00.00.01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kota Bima	100%	198.382.200,00			100%	208.301.310,00
2	08	2.08.00.00.01	01	2.02	0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan		23 Bulan	2.660.254.574,00			23 Bulan	2.793.267.303

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		12 Bulan	122.400.000,00			12 Bulan	128.520.000
2	08	2.08.00.00.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	1.879.000,00			1 Laporan	1.972.950
2	08	2.08.00.00.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran		1 Lap. Prognosis (LRA)	1.839.000,00			1 Lap. Prognosis (LRA)	1.930.950
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kota Bima	100%	198.382.200,00			100%	208.301.310,00
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan penerangan lingkungan / bangunan kantor yang memadai dan representatif		8 Komponen	2.212.800,00			8 Komponen	2.323.440
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor		10 Jenis	30.311.000,00			10 Jenis	31.826.550
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman		12 Bulan	9.744.000,00			12 Bulan	10.231.200
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan bahan yang dicetak dan digandakan		12 Bulan	26.146.400,00			12 Bulan	27.453.720
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media		8 media	-			8 media	0
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	129.968.000,00			12 Bulan	136.466.400
2	08	2.08.00.00.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100%	9.450.000,00			100%	9.922.500,00
2	08	2.08.00.00.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan		1 pkt	-			1 pkt	0
2	08	2.08.00.00.01	01	2.07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		3 Unit	9.450.000,00			3 Unit	9.922.500

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang diadakan								
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bima	100%	96.424.800,00			100%	101.246.040,00	
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dan jumlah jasa Non Pegawai selama 1 tahun		12 Bulan	61.560.000,00			12 Bulan	64.638.000
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	10.816.800,00			12 Bulan	11.357.640
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor		12 Bulan	24.048.000,00			12 Bulan	25.250.400
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100%	122.400.000,00			100%	128.520.000,00	
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		13 Unit	90.010.000,00			13 Unit	94.510.500
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		1 unit	18.870.000,00			1 unit	19.813.500
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara		13 Unit	9.250.000,00			13 Unit	9.712.500
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara		7 Unit	4.270.000,00			7 Unit	4.483.500
2	08	2.08.00.00.01	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	Kota Bima	30%	3.097.698.822,00				3.252.583.763,10	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PUG	Kota Bima	100%	61.818.600,00			100%	64.909.530,00
2	08	2.08.00.00.01	02	2.013	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG termasuk PPRG		12 Dokumen	33.612.800			12 Dokumen	35.293.440
2	08	2.08.00.00.01	02	2.014	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG		50 org	28.205.800,00			50 org	29.616.090
2	08	2.08.00.00.01	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bima	100,00 %	1.094.613.400,00			100,00%	1.149.344.070,00
2	08	2.08.00.00.01	02	2.022	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina		30 organisasi	1.094.613.400,00			30 organisasi	1.149.344.070
2	08	2.08.00.00.01	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Bima	Kota Bima	100%	1.941.266.822,00			100%	2.038.330.163,10
2	08	2.08.00.00.01	02	2.031	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan		25 kelompok	1.506.271.850,00			25 kelompok	1.581.585.443
2	08	2.08.00.00.01	02	2.033	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk		10 unit	434.994.972,00			9 klpk	456.744.721

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kota Bima	100%	211.252.100,00				91.496.675,00
2	08	2.08.00.00.01	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Bima	100%	32.978.900,00			100%	34.627.845,00
2	08	2.08.00.00.01	03	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)		1 dok	24.167.800,00			2 dokumen	25.376.190
2	08	2.08.00.00.01	03	2.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penghapusan kekerasan terhadap perempuan		50 org	8.811.100,00			50 org	9.251.655
2	08	2.08.00.00.01	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Bima	100%	178.273.200,00			100%	56.868.830,00
2	08	2.08.00.00.01	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas yang terbentuk		16 kel	23.457.800,00			13 kel	24.630.690
2	08	2.08.00.00.01	03	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah layanan rujukan lanjutan terhadap perempuan korban kekerasan		8 kss	154.815.400,00			8 kss	32.238.140
2	08	2.08.00.00.01	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Porsentase pemenuhan Data Gender dan anak	Kota Bima	100%	18.838.000,00				19.779.900,00
2	08	2.08.00.00.01	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Kota Bima		18.838.000,00				19.779.900,00

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Daerah Kabupaten/kota	Kelembagaan Data							
2	08	2.08.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		10 dok	9.582.000,00			10 dokumen	10.061.100
2	08	2.08.00.00.01	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI		4 kl	9.256.000,00			4 kali	9.718.800
2	08	2.08.00.00.01	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Bima	61,70 %	180.992.200,00				190.041.810,00
2	08	2.08.00.00.01	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Bima	100%	115.982.200,00			100%	121.781.310,00
2	08	2.08.00.00.01	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak		7 lembaga	22.256.100,00			7 lembaga	23.368.905
2	08	2.08.00.00.01	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan da kecamatan		50%	93.726.100,00			30%	98.412.405
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Bima	100%	65.010.000,00			100%	68.260.500,00
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak		32 sekolah & 3 puskesmas	4.320.000,00			36 sekolah & 2 puskesmas	4.536.000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Forum Anak yang Terpilih		3 org	60.690.000,00			3 org	63.724.500
2	08	2.08.00.00.01	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	Kota Bima	100%	372.561.700,00				391.189.785,00
2	08	2.08.00.00.01	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kota Bima	100%	28.972.200,00			100%	30.420.810,00
2	08	2.08.00.00.01	07	2.01	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak		50 org	0,00			50 org	0
2	08	2.08.00.00.01	07	2.01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		50 org	28.972.200,00			50 org	30.420.810
2	08	2.08.00.00.01	07	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kota Bima	100%	294.749.600,00			100%	309.487.080,00
2	08	2.08.00.00.01	07	2.02	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani		17 org	85.475.000,00			17 org	89.748.750
2	08	2.08.00.00.01	07	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan anak korban kekerasan		12 kss	209.274.600,00			12 kss	219.738.330

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kota Bima	100%	48.839.900,00			100%	51.281.895,00
2	08	2.08.00.00.01	07	2.03	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM		50 Org	11.416.200,00			50 Org	11.987.010
2	08	2.08.00.00.01	07	2.03	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		10 Klp PATBM	37.423.700,00			12 Klp PATBM	39.294.885
					JUMLAH				7.113.285.396,00				7.338.631.635,80

BAB IV.

RENCANA KEGIATAN, DAN PENDANAAN DAERAH

Dari uraian kegiatan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat serta membuka peluang kaum Perempuan dalam mendapatkan hak maupun kesempatan yang sama dengan kaum laki laki sehingga pemberdayaan perempuan sangat perlu diperlukan.

Salah satu Program Inovasi melalui Dinas PP dan PA kota Bima adalah menyediakan Rumah Aspirasi pemberdayaan Perempuan (RAPP) sebagai wadah kaum perempuan dalam mengembangkan diri.

Adapun tujuan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan pengembangan lainnya ke arah kemampuan hidup
2. Sebagai sarana aspirasi dan tukar pikiran kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya
4. Mewadahi dan memfasilitasi kaum perempuan guna mendukung pembangunan diri dan peran perempuan dalam masyarakat
5. Meningkatkan nilai nilai dasar agama, sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari kelima tujuan rumah aspirasi tersebut dapat dilaksanakan kegiatan melalui :

- Peningkatan pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan, Peningkatan Iman dan Taqwa, Wadah Pengaduan Perempuan, Media diskusi dan tukar pikiran
6. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai 6 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.
 7. Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah pendataan kekerasan perempuan dan pendataan kekerasan anak di Kota Bima dalam hal KDRT.
 8. Total kebutuhan dan/pagu indukaif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2022 yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan arah kebijakan tahun 2022 dalam RPJMD adalah Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan dan Mewujudkan Kota layak anak. Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima memiliki 6 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2022 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas PP dan PA Kota Bima akan semakin integratif dan komprehensif.

Dari uraian pada bab-bab diatas, maka dapat diambil beberapa catatan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai.
2. Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun Anggaran 2022 perlu di tambahkan lagi.
3. Perlu ada laporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Demikian penyusunan Rencana Kerja yang kami buat, kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, Amin.

Raba-Bima, April 2021

Kepala,

H. Ahmad, SE
Pembina BK IV.b
Nip. 19630213 199203 1 006